

# LELANG KEPEDULIAN UNTUK PEMBERDAYAAN KELUARGA

Pada awal tahun sembilan puluhan disepakati *UU tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera* serta *UU tentang Kesehatan*. Kedua UU itu segera diikuti dengan beberapa *Peraturan Pemerintah* yang mengatur kegiatan operasional bidang-bidang yang relevan.

Pada tahun itu pula Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam kancha dunia, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang KB. Namun mulai dirasakan bahwa para peserta yang sudah bertahun-tahun ber-KB yang dengan tuntunan para pengasuh dan pembinanya telah menjadi peserta KB yang setia belum merasakan keadaan yang lebih baik.

Tingkat kemiskinan yang ditahun 1970-an dan di tahun 1980- an menurun dengan cukup signifikan makin menonjol kan tingkat penurunan yang "*stalling*" atau *melamban*. Pemerintah kemudian mulai menggagas *upaya khusus untuk mengentaskan kemiskinan* berupa dukungan kepada komunitas yang mempunyai daerah-daerah atau kelompok masyarakat yang berhasil dalam berbagai program pembangunan. Disamping itu diusahakan pula dukungan khusus untuk pengentasan kemiskinan bagi daerah-daerah yang relatif sangat miskin.

## *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*

Gagasan penghargaan kepada komunitas itu makin marak setelah disyakkannya UUD tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang menunjukkan diperlukannya pemberdayaan seluruh *fungsi keluarga* yang secara jelas disebutkan dalam PP yang dikeluarkan atas dasar PP nomor 10 tahun 1994.

Fungsi-fungsi keluarga yang menjadi dasar proses pemberdayaan keluarga itu adalah sebagai berikut:

- ↳ Fungsi keagamaan
- ↳ Fungsi kehudayaan
- ↳ Fungsi cinta kasih
- ↳ Fungsi perlindungan
- ↳ Fungsi reproduksi
- ↳ Fungsi pendidikan
- ↳ Fungsi ekonomi
- ↳ Fungsi lingkungan

Selama ini telah banyak diberikan dukungan pemberdayaan untuk fungsi-fungsi keagamaan, budaya dan perlindungan atau cinta kasih dan reproduksi, namun

terbatas pada bimbingan oleh para Ulama dan para Pemimpin Agama. Untuk meningkatkan peran keluarga, program-program makin diarahkan untuk memberdayakan keluarga dengan memberi kesempatan kepada masyarakat mengambil prakarsa melalui peningkatan mutu program masyarakat sendiri. Kesempatan ini berbeda dengan program masa lalu yang prakarsanya banyak dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan mengatur dan memahami tujuan program-program itu dalam konteks hak dan kewajiban reproduksi dan pemeliharaan generasi untuk masa depan yang lebih baik.

Untuk memberikan dukungan terhadap fungsi-fungsi pendidikan, ekonomi dan lingkungan, pemerintah memberikan dukungan yang makin kuat. Proses dukungan untuk pendidikan dan ekonomi sekaligus juga diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu.

Karena sifat keterpaduan tersebut, maka pemerintah secara khusus mengadakan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program yang ditahun 1993-1994 disebut Program Inpres Desa Tertinggal untuk desa-desa yang dipandang sangat miskin.

Pada awal tahun 1994 pemerintah *mengadakan pendataan* untuk mempersiapkan *pemberdayaan fungsi-fungsi keluarga* yang ada. Untuk menterjemahkan seluruh fungsi keluarga tersebut setelah mengadakan berbagai seminar, antara lain dengan *Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI)*, pemerintah mengeluarkan 23 indikator sederhana yang bersifat "*mutable*" atau bisa diubah sendiri oleh yang bersangkutan.

Dari pendataan tersebut dapat diketahui tanda-tanda keluarga yang kalau dibiarkan bisa jatuh miskin. Tanda-tanda itu disebut dengan istilah *keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I*. Dari pendataan dapat diketahui bahwa biarpun di desa IDT jumlah keluarga dengan tanda-tanda itu proporsinya di setiap desa rata-rata lebih tinggi, tetapi jumlah untuk seluruh desa non IDT ternyata lebih besar karena jumlah desa yang lebih banyak.

Karena *Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)* disediakan untuk *desa-desa IDT saja*, pemerintah segera mengembangkan program *untuk desa-desa non IDT*. Karena dana pemerintah tidak tersedia, maka pemerintah segera merangsang *partisipasi masyarakat* untuk mengembangkan program dengan dana masyarakat. Untuk itu di berbagai daerah segera diadakan apa yang disebut *gerakan lantainisasi* atau *gerakan plesterisasi*, untuk menolong keluarga yang rumahnya sangat sederhana dan boleh disebut tidak layak huni karena lantainya tanah, dindingnya berlubang dan atapnya sangat tidak sehat kalau hujan tiba. Di beberapa daerah gerakan lantainisasi ini berkembang pula menjadi gerakan perbaikan rumah secara utuh yang kadang-kadang disebut sebagai *gerakan Aladin*, untuk memperbaiki *atap, lantai dan dinding* rumah yang dipandang tidak layak huni.

Karena tidak setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan akan semen dan alat bantu lainnya untuk keperluan lantainisasi atau aladinisasi itu maka dikembangkan upaya

gotong royong antar anggota masyarakat membantu mereka dengan semen pasir dan dikerjakan gotong royong beramai-ramai antar anggota tetangga dalam suatu kampung atau RT.

Keberhasilan lantainisasi ini sangat menarik. Banyak rumah secara beramai-ramai dirapikan oleh anggota masyarakat sehingga keadaan keluarga yang miskin itu makin lama makin membaik.. Mereka juga sangat berterima kasih karena gerakan itu menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya hidup gotong royong dengan sesamanya dalam lingkungan yang penuh kedamaian dan kebersamaan.

Gerakan lantainisasi ini kemudian dikembangkan makin luas untuk membantu setiap keluarga miskin agar mempunyai usaha kecil-kecilan agar bisa membebaskan diri dari lembah kemiskinan secara lestari. Untuk itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan harus dipikul secara gotong royong. Agar upaya itu dapat dipikul bersama, maka kemudian diadakan *gerakan masyarakat* untuk merangsang partisipasi yang tulus. Gerakan itu disebut *Lelang Kepedulian* atau *Lelang Peduli*.

Hasil lelang di setiap daerah itu kemudian diperbantukan pada keluarga miskin dan masyarakat setempat untuk menuntaskan pengentasan kemiskinan untuk daerah yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melanjutkan lantainisasi atau plesterisasi dan pemberian modal kepada keluarga miskin.

### **Keluarga Mandiri**

Seiring dengan adanya lelang kepedulian itu maka para konglomerat juga merasa terpanggil dan ikut serta memberikan bantuannya melalui berbagai perusahaan di daerah-daerah. Dengan gerakan yang marak, maka tujuan pembangunan keluarga kecil yang sejahtera dan mandiri herkembang menjadi keluarga berkualitas dan mandiri, termasuk makin besarnya dukungan terhadap upaya pembangunan sumber daya manusia dengan adanya wajib belajar.

Karena harus melayani gerakan yang luas di daerah-daerah itu para pengusaha yang mempunyai kantor pusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan sebagainya merasa kikuk. Akhirnya mereka mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk suatu lembaga penampung di kantor pusat Jakarta yang berbentuk Yayasan agar tidak menjadi lembaga birokrasi yang kaku. Mereka juga mengusulkan agar Bapak HM. Soeharto sendiri berkenan mengetuai Yayasan tersebut. Maka pada akhir tahun 1995 tersebut disepakati pendirian Yayasan Damandiri untuk membantu sekitar 11.2 juta keluarga miskin di desa-desa non IDT.

Selanjutnya dikembangkan peranan Yayasan Damandiri untuk membantu pengentasan keluarga miskin di desa-desa non IDT tersebut dengan proses mandiri dengan dana yang berasal dari para pengusaha maupun para simpatisan lainnya. Proses itu dilakukan dengan mengajak mereka belajar menabung dalam tabungan yang dinamakan *Tabungan Keluarga Sejahtera atau Takesra*. Untuk itu para pengusaha memberikan sumbangan sebesar *Rp. 23 milyar* untuk mengisi tabungan awal para keluarga miskin masing-masing *sebesar Rp. 2.000,- per keluarga*.

Tabungan awal Rp. 2.000.- itu diberikan kepada *sekitar 11,2 juta keluarga*. Setiap keluarga yang menerima tabungan diharapkan diberdayakan dan dikembangkan untuk mampu terus mengisi tabungan masing-masing secara mandiri. Pekerjaan yang nampaknya sederhana itu tidak mudah. Untuk mengajak sekitar 11.2 juta keluarga itu menabung dibutuhkan waktu lebih dari satu tahun. padahal BKKBN pada waktu itu mempunyai nama dan alamat dari seluruh keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I itu. Gerakan tabungan itu sekaligus sejalan dengan upaya lelang kepedulian dan kebersamaan yang tetap dikembangkan di setiap desa yang dianggap mempunyai penduduk atau keluarga yang dianggap kurang mampu.

Upaya gerakan sadar menabung itu secara resmi dimulai pada tanggal 2 **Oktober 1995** dengan upacara resmi di Istana Negara. Upaya ini mendapat dukungan pemberitaan secara besar-besaran dalam berbagai media massa nasional maupun internasional. Mereka yang sudah mempunyai tabungan diberikan kesempatan untuk meminjam dana dengan bunga rendah mulai dari **Rp. 20.000**. Kalau pinjaman dengan bunga hanya 6% itu telah dilunasi atau minimal 75% dilunasi, maka keluarga yang bersangkutan bisa mendapat pinjaman baru sebesar dua kali lipat pinjaman pertama atau **Rp. 40.000**. Kalau pinjaman ini sudah 75% ini dilunasi, maka mereka bisa meminjam dua kali lipat pinjam Rp. 40.000.-, yaitu sebesar **Rp. 80.000, begitu seterusnya**. Pinjaman ini dinamakan **Kredit Usaha Keluarga Sejahtera** atau **Kukesra**.

Laporan **Bank BNI** bulan **Maret 2002** menggambarkan bahwa kegiatan Takesra dan Kukesra tetap berjalan dengan baik. Jumlah **keluarga pra sejahtera** dan **keluarga sejahtera I** atau **keluarga kurang mampu** yang mempunyai tabungan Takesra pada bulan **Februari 2002** adalah **13.099.413 keluarga** dengan nilai tabungan sebesar **Rp. 213.891.729.347 (dua ratus tigabelas milyar delapan ratus sembilanpuluh satu juta tujuhratus duapuluh sembilan ribu tigaratus empatpuluh tujuh rupiah)**.

Para peserta keluarga kurang mampu itu bergabung dalam **631.040 kelompok** dan sebagian besar memanfaatkan kredit **Kukesra** untuk usaha-usaha ekonomi produktif dalam lingkungan kelompok atau desanya masing-masing. Jumlah keluarga yang memanfaatkan kredit **Kukesra** sampai **akhir Februari 2002** adalah sebanyak **10.467.392 keluarga dengan jumlah kredit Kukesra sebesar Rp. 1.741.090.520.000 (Satu trilliun tujuhratus empatpuluh satu milyar sembilanpuluh juta limaratus duapuluh ribu rupiah)**.

Dana tabungan setiap nasabah itu tersimpan rapi pada Bank BNI dan menjadi bagian dari pemupukan modal untuk para peserta yang telah makin mampu mengambil kredit Kukesra. Dari pengalaman itu diperoleh gambaran bahwa **Lelang Kepedulian** telah berubah menjadi **usaha dengan dukungan kredit mikro** yang menarik. (**Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan**)-**Keluarga-862002**.

# MENGHIDUPKAN ASET MATI KELUARGA MISKIN

Pemerintah bertekad mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui gerakan dan program terpadu yang mantap, pendampingan dan pembinaan yang sekaligus disertai penyediaan dana sekitar Rp 20 miliar, diharapkan dapat menurunkan dari tingkat kemiskinan sekitar 19 persen tahun ini (2002) menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2004. Upaya pengentasan kemiskinan ini disampaikan Menko Kesra, Yusuf Kalla di depan sejumlah wartawan usai Sidang Kabinet beberapa waktu lalu.

Kita sangat menaruh harapan bahwa upaya itu akan segera dilaksanakan karena rakyat sudah sangat menunggu uluran tangan pemerintah yang nyata dalam bidang ini. Tahun 1996 merupakan tingkat kemiskinan yang mencapai titik paling rendah. Sekitar 11 persen dari seluruh penduduk yang ada, pernah naik hingga 40 persen karena krisis multidemensi yang luar biasa. Kita juga mengetahui bahwa dari peta penduduk miskin yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat daerah-daerah yang begitu parah. Sehingga, dengan usaha yang sangat ketat pun tidak mungkin jumlah penduduk miskin itu diturunkan demikian drastis. Tetapi kita juga mengetahui bahwa ada daerah-daerah dimana penduduk dan keluarga yang ada relatif mudah dapat dirangsang secara mandiri menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang selama 32 tahun telah berhasil membantu masyarakat menurunkan tingkat kelahiran mendasarkan kerjanya pada peta keluarga yang cukup akurat. Dalam tujuh tahun terakhir peta keluarga itu dilengkapi dengan informasi tentang ciri-ciri keluarga yang makin lengkap melalui pendataan yang berkesinambungan. Sejak tahun 2000 lalu, hampir 47 juta keluarga dari seluruh Indonesia secara terperinci telah dapat disusun dalam peta keluarga milik BKKBN, termasuk indikator kasar keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Peta itu dapat dipergunakan sebagai pedoman berbagai instansi dan lembaga masyarakat untuk mengembangkan program-program yang sesuai dengan kondisi dan pilihan sasaran yang tepat. Peta itu dapat pula dipergunakan untuk membantu setiap keluarga mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan.

## **Aset mati**

Harapan mengucurnya dana sebesar Rp. 20 trilliun kiranya tidak membuat para pelaksana di lapangan menunggu jatuhnya durian runtuh secara berlebihan. Alangkah baiknya apabila pemerintah daerah dalam era otonomi ini, meluangkan waktu, menyediakan tenaga dan dana untuk memperluas dan meningkatkan penggunaan peta itu untuk membantu masyarakat dan keluarga kurang mampu melepaskan diri dari lembah kemiskinan dengan menggali sumber-sumber daya yang ada di lapangan. Berdasarkan peta yang ada, pemerintah daerah dapat memperbaiki pelayanan yang memungkinkan masyarakat desa mendapatkan kemudahan agar keluarga kurang mampu dapat melepaskan diri dari lembah kemiskinan, antara lain dengan memanfaatkan “aset-aset tidur atau aset-aset mati” (*dead capital*) yang dimiliki masyarakat di desa atau di daerah.

Di pedesaan sangat banyak aset-aset berharga yang dibiarkan tidur, mati, atau setengah mati dan tidak menghasilkan. Sebut saja salah satu contoh pengalaman Karsono dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan lima orang saudaranya Karsono mendapat warisan rumah, sawah dan ladang dari orang tuanya. Pada waktu orang tuanya masih muda, rumah, sawah dan ladang itu menjamin kehidupan yang sangat sejahtera untuk orang tua dan anak-anaknya, barangkali juga bagi kakek dan neneknya. Hasil sawah dan ladang lebih dari cukup untuk menghidupi anak-anak semasa masih kecil. Tetapi karena “merasa cukup” itu, oleh orang tuanya Karsono dan adik-adiknya tidak dikirim ke sekolah dengan tuntas. Hanya Karsono sempat menjadi “jebolan-SMU” (DO-SMU) di kecamatannya. Adik-adiknya hanya tamat SLTP, bahkan dua orang adik perempuannya, hanya sampai kelas I SLTP di desanya. Orang tua mereka menganggap bahwa anak-anak desa tidak perlu sekolah karena akhirnya mereka akan membantu orang tuanya menggarap sawah dan ladangnya saja.

Begitu kedua orang tuanya meninggal dunia, Karsono menikah dan adik-adiknya juga satu demi satu menikah, sehingga peninggalan orang tua terasa makin sempit untuk menghidupi keluarga yang bertambah besar. Apalagi sawah yang mereka warisi adalah sawah tadah hujan dan ladang milik mereka hanya menghasilkan buah-buahan hasil tumbuhan alamiah yang bersifat musiman. Keluarga sejahtera yang semula memancar dari keluarga orang tua Karsono makin meredup dan berubah menjadi keluarga kurang mampu yang menyedihkan. Walaupun secara fisik keluarga itu masih mempunyai rumah, sawah, dan ladang luas yang menghasilkan, hasil warisan itu tidak bisa menjamin hidup keluarga Karsono dan adik-adiknya sepanjang tahun. Dalam musim kering, harta warisan itu bisa dikatakan “mati” dan hampir tidak berharga karena tidak menghasilkan sesuatu untuk menopang hidup keluarga Karsono, adik-adik, ipar dan keponakannya. Mereka pun tidak berani menjual harta warisan karena takut terkena kutukan nenek moyang.

Satu tahun yang lalu keluarga Karsono mendengar kabar tentang program pemberdayaan *Pundi* dari *Yayasan Damandiri* yang memberi kesempatan bimbingan dan dukungan kredit untuk mengembangkan wirausaha bagi kelompok-kelompok keluarga kurang mampu yang bersemangat maju. Dengan persetujuan Karsono sebagai kepala keluarga, seluruh keluarga sepakat untuk menghidupkan “*aset setengah mati*” yang dimiliki oleh keluarga dari warisan orang tuanya itu. Warisan itu diurus kelengkapan dokumen dan surat-surat resminya. Warisan yang dilengkapi dengan surat-surat resmi itu menjadi aset hak milik yang disepakati oleh keluarga untuk tidak dipecah dan dijual belikan agar tetap menjadi satu kesatuan yang cukup besar dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Dengan dukungan surat-surat resmi itu keluarga Karsono telah “menghidupkan” aset warisan orang tuanya menjadi potensi ekonomi yang berharga. Dengan surat-surat berharga itu keluarga Karsono pergi ke Bank Bukopin di Semarang meminjam uang untuk membeli dua sepeda motor guna membangun “perusahaan angkutan” di desanya. Usaha angkutan itu melayani rakyat yang membutuhkan bantuan angkutan dari desa ke kota sekitarnya dengan fasilitas “ojeg” di desanya. Karsono dan adik laki-laknya menjadi pemimpin dan sekaligus pelaksana operasinya.

Karena kerajinannya, pinjaman dengan agunan rumah, sawah dan ladang itu dengan mudah dapat dicicil dari penghasilan ojeg selama musim tidak sibuk di sawahnya. Bahkan kalau dia dan adiknya sibuk di sawah, kegiatan ‘perusahaannya’ dapat diteruskan oleh pemuda lain di desanya. Dengan cara itu rakyat dan masyarakat yang selama ini ‘terpaksa tidur’ karena miskin, atau secara ekonomis tidak ada fasilitas, bisa dibangkitkan semangat dan kerjanya untuk ikut dalam pembangunan.

### *Partisipasi perempuan*

*Program Pundi, pembinaan usaha keluarga sejahtera mandiri*, yang memberi perhatian khusus kepada keluarga, para ibu atau perempuan untuk ikut dalam usaha ekonomi produktif, menggelitik isteri dan adik-adik perempuan Karsono. Sebagian dari hasil ojeg dipergunakan untuk usaha jual sayuran dan buah-buahan segar di pasar-pasar. Pada suatu saat mereka mengetahui bahwa berjualan biasa kurang memberi hasil nilai tambah yang bermakna. Mereka ingin menjadi “*supplier*” yang melayani pedagang seperti dirinya di pasar. Untuk itu diperlukan modal yang lebih besar. Sebagai nasabah Bank Bukopin mereka juga mendengar bahwa untuk itu Program Pundi di Semarang bisa juga melayani hal-hal kecil seperti itu *di Koperasi Swamitra* binaan Bank Bukopin.

Ibu Karsono bersama adiknya segera berkunjung ke *Koperasi Swamitra* di pasar *Karangayu*, Semarang, suatu koperasi binaan *Bank Bukopin Cabang Semarang*. Mereka mencari informasi bagaimana memperoleh pinjaman untuk memperluas usaha menjadi “*supplier*” melayani pedagang sayur dan buah di pasar-pasar.

Oleh petugas yang luwes mereka diberi informasi bahwa setiap nasabah anggota bisa meminjam uang dari lembaga koperasi swamitra itu asalkan usahanya dinilai produktif, mempunyai agunan yang cukup, sanggup membayar cicilan dan bunga secara teratur. Dengan informasi itu isteri dan adik ipar Karsono kemudian meminta kerjasama suaminya untuk menyetujui penggunaan sepeda motor sebagai agunan untuk usahanya itu. Suami yang bijak setuju karena mengerti bahwa sepeda motor yang dipergunakan sebagai agunan untuk pinjaman isterinya kepada kopersai swamitra, seperti juga sawah dan ladang yang dipergunakan sebagai agunan pinjaman untuk sepeda motornya, tidak perlu diserahkan kepada Bank. Cukup suratnya saja yang diserahkan dan sepeda motor itu tetap dapat dimanfaatkan sebagai ojeg untuk menjamin kelangsungan usahanya sehari-hari.

Dengan persetujuan itu ibu Karsono kembali kepada koperasi swamitra untuk memproses pinjamannya. Dengan kecepatan yang tinggi petugas yang bertanggung jawab menyepakati permintaan itu dan segera akan mengadakan penelitian atau survey lapangan. Survey lapangan itu adalah untuk memotret sepeda motor yang sedang dioperasikan oleh pak Karsono, aset yang sebenarnya secara ekonomi sudah sangat produktif, ternyata “*surat sepeda motor*” itu “*bisa dihidupkan*” juga menjadi agunan untuk keperluan isterinya. Survey itu juga termasuk mengecek tempat usaha di pasar, sumber sayuran yang dibeli dan mungkin saja bangun pagi-pagi sebelum jam 03.00 pagi untuk mengikuti operasi lapangan membeli sayur dan membagikan sayur dan buah-

buah segar kepada para langganan di pasar-pasar. Menurut informasi, antara survey lapangan dan keputusan mulai mengalirnya dana itu harus bisa selesai tidak lebih dari satu minggu. Setelah itu, kalau upaya itu dianggap secara ekonomis bisa dipertanggung jawabkan, Ibu Karsono akan mendapat kepastian diterima sebagai nasabah swamitra dan dianggap layak menerima kredit sesuai nilai taksir agunan sepeda motor tersebut. KEPADANYA dapat diberikan kredit dan secara resmi menjadi keluarga swamitra yang dibina oleh Bank.

Usaha yang dicontohkan oleh kegiatan pak Karsono dengan keluarganya itu adalah upaya menghidupkan *‘aset mati atau aset setengah mati’* yang ternyata bisa meningkatkan *partisipasi rakyat* dalam *pengembangan wirausaha*. Dengan contoh sederhana itu ternyata pengembangan kewirausahaan tidak harus diperlukan modal yang sangat besar dari pemerintah karena di pedesaan tersedia aset yang selama ini potensial tetapi belum seluruhnya dihidupkan dengan kemudahan dari pemerintah daerah. Dengan kemudahan seperti penyederhanaan urusan surat-surat tanah, sertifikat hak milik, dan bantuan lainnya, surat-surat itu akan mempermudah pemilik menghidupkan asetnya menjadi agunan untuk pinjaman keperluan pengembangan ekonomi rakyat kepada Bank.

Karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan yang akan digalakkan, pengembangan peta wilayah yang akurat akan memberi makna kepada para penguasa otonomi daerah dengan sentuhan yang mengena hati rakyat banyak. Rakyat harus melihat bahwa *otonomi daerah* adalah untuk *memperbaiki nasib rakyat*, melalui kesempatan membangun yang diberikan kepada rakyat. *Otonomi* bukan sekedar untuk menaikkan pendapatan daerah, seperti biaya pembuatan surat sertifikat tanah, atau memberi kesempatan para pejabatnya mendapat honor lebih tinggi, jalan-jalan ke luar negeri atas beban rakyat, atau membangun dengan mengorbankan gaji guru atau karyawan kecil lainnya, tetapi harus berarti membantu rakyat menghidupkan aset-aset yang “setengah mati” untuk bisa dipergunakan dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yang menguntungkan dirinya dan meningkatkan pendapatannya dalam kerangka persatuan dalam lingkungan keluarganya, lingkungan desanya dalam rangka ketenangan berusaha di desa dan wilayahnya.

Mudah-mudahan hal-hal yang nampaknya sederhana tetapi sangay strategis dan menyentuh hati nurani rakyat kecil itu mendapat perhatian Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri bersama para Menterinya, para Gubernur, para Bupati dan Walikota, serta kekuatan pembangunan lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. (Prof. Dr Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan) –*Aset-Miskin-2332002*.

## **SULITNYA MENGAWALI USAHA MANDIRI**

Melalui berbagai program pembangunan pemerintah, masyarakat dan keluarga Indonesia telah berusaha melepaskan diri dari lembah kemiskinan. Namun, karena masalah kemiskinan adalah suatu persoalan yang sangat berat, setiap usaha tidak selalu berhasil dengan mulus. Usaha-usaha itu ada yang berhasil mengangkat sebagian dari keluarga yang menderita, tetapi ada juga yang sama sekali gagal. Pada tahun 1993 pemerintah, dan masyarakat, mulai melakukan beberapa langkah strategis secara serentak. Di desa-desa tertinggal dilakukan upaya terpadu pengentasan kemiskinan dengan suatu program yang disebut Inpres Desa Tertinggal (IDT). Di desa yang relatif tidak tertinggal dikembangkan upaya lain, yaitu Program Takesra dan Kukesra.

Biarpun program itu tidak seluruhnya berhasil karena berbagai alasan, ada beberapa hal yang menarik untuk kita simak bersama. Salah satu fenomena yang menonjol adalah bahwa penyediaan dana saja tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga pra sejahtera atau keluarga sejahtera I atau keluarga miskin yang ada. Mereka banyak sekali mempunyai keterbatasan atau menghadapi masalah sosial kemasyarakatan yang biasanya tidak mendukung.

Apabila mereka bisa menghasilkan suatu produk tertentu, karena keahlian yang sangat terbatas, umumnya mereka hanya mampu menghasilkan produk-produk yang mutunya sangat rendah dan tidak bisa menarik banyak konsumen. Akibatnya produk itu tidak laku di jual di pasar, bahkan tidak laku di jual di pasar lokal sekalipun. Karena itu mereka sangat memerlukan pendamping untuk mencapai tingkat produk yang layak jual.

Andaikan mereka mampu memproduksi sesuatu barang, terutama yang cara membuatnya mereka pelajari dari berbagai kursus yang banyak diselenggarakan oleh PKK atau organisasi lain semacam itu, umumnya sukar dijual. Alasannya sangat sederhana. Para peserta kursus biasanya mendapat "guru" yang orientasinya bukan pasar, tetapi keahliannya sendiri. Karena orientasinya adalah keahlian sendiri, atau keahlian gurunya, maka hasil produk itu tidak selalu menarik pasar, sehingga barang hasil produk itu tidak atau kurang laku jual. Kalau laku jual biasanya mempunyai nilai tambah yang sangat rendah.

Hal lain yang menarik adalah bahwa andaikan mereka termasuk "ahli" dan mampu memproduksi barang yang layak jual karena kualitas yang memadai, keahlian yang mereka miliki biasanya hanya dimiliki oleh satu orang, atau keahlian yang dimiliki oleh sedikit sekali orang atau anggota keluarganya, sehingga kemampuan produksinya juga sangat terbatas. Karena itu "pasar" yang dapat mereka layani juga menjadi sangat terbatas sehingga usaha yang mereka tekuni tidak akan mampu mengangkat seluruh keluarga dan anggotanya terlepas dari lembah kemiskinan yang telah menyeret mereka bertahun-tahun lamanya.

Kemungkinan lain tidak kalah menariknya. Andaikan mereka mampu menghasilkan produk dengan kualitas lumayan, dan jumlahnya bisa banyak, tetapi pasarnya terbatas, maka keahlian itu tidak banyak gunanya. Mereka bisa terbentur pada

upaya memperluas pasar yang biasanya tidak bisa mereka lakukan sendiri. Untuk meminta bantuan pihak lain, biasanya tidak ada yang siap membantu pemasaran itu. Kalau toh ada yang membantu, mereka akan meminta imbalan yang tidak mungkin dibayar oleh keluarga miskin yang baru bangkit tersebut. Sungguh sangat dilematis.

Usaha yang muncul dari Program IDT maupun program awal Takesra Kukesra, karena menyangkut keluarga yang sangat miskin, umumnya mempunyai basis pedesaan, pertanian atau hasil-hasil lain yang berasal dari produk pertanian. Produk-produk semacam itu, disamping pasarnya lokal, nilai tambahnya juga sangat kecil. Produk-produk yang mereka kerjakan juga sangat terpengaruh oleh musim, atau bahan baku yang relatif terbatas pada musim. Karena keterbatasan bahan baku tersebut, pada umumnya mereka mendapat kesukaran memperluas produksi atau pemasaran. Perluasan produksi akan membutuhkan bahan baku yang sumbernya tidak lagi ada di desanya. Perolehan bahan baku semacam yang lebih banyak memerlukan dukungan jaringan yang luas dan modal yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang disediakan dalam program.

Namun kita tidak perlu pesimis. Program-program IDT maupun Takesra Kukesra, yang umumnya berbasis komunitas, masih menyisakan kepercayaan diri yang lumayan. Banyak dari kelompok-kelompok yang dibina oleh program ini sekarang tumbuh menjadi kelompok bisnis yang lumayan. Modal awal Takesra, Tabungan Keluarga Sejahtera, yang semula hanya Rp. 2000,- per keluarga dan diikuti oleh hanya ribuan keluarga, sekarang telah berkembang menjadi program yang sangat besar. Tidak kurang dari 13 juta keluarga telah ikut dalam program ini dengan tabungan lebih dari Rp. 240 milyar.

Keluarga-keluarga itu, yang semula mulai belajar bekerja dengan pinjaman modal sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 20.000,-, kemudian kalau sudah membayar baru bisa naik pinjamannya menjadi Rp. 40.000,-, naik lagi menjadi Rp. 80.000,- dan akhirnya naik pada tahap ke lima menjadi Rp. 320.000,-, sekarang telah berhasil menyerap dana pinjaman sebesar lebih dari Rp. 1,6 triliun. Banyak kelompok-kelompok yang berhasil dan meneruskan pinjamannya serta memperoleh pembinaan usahanya dari program lanjutan, yaitu program Kukesra Mandiri atau program PUNDI.

Dalam program lanjutan itu para Ibu anggota kelompok tidak lagi harus membatasi pinjamannya pada jumlah Rp. 320.000,- saja, tetapi bisa naik menjadi Rp. 1 juta, bahkan sudah ada yang mempunyai pinjaman sebesar Rp. 5 juta. Mereka yang sangat berhasil telah ada yang mempunyai pinjaman untuk modal dan perluasan usahanya dengan jumlah pinjaman lebih dari Rp. 15 juta.

Dengan bimbingan yang makin profesional dan modal yang makin besar ternyata keluarga yang berhasil itu mempunyai tingkat solidaritas yang tinggi. Umumnya mereka segera mengajak saudara atau teman lain yang belum bekerja atau mempunyai nasib yang serupa. Dengan cara itu keluarga miskin secara langsung ikut mengentaskan keluarga miskin lainnya. Program pengentasan kemiskinan menjadi suatu gerakan yang menarik dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Kapan anda bergabung dengan usaha yang sangat mulia itu? (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*) – *Pengantar-8102001*

# INVESTASI UNTUK MANDIRI

Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah, masyarakat dan keluarga Indonesia telah berusaha melepaskan diri dari lembah kemiskinan. Namun, karena masalah kemiskinan adalah suatu persoalan yang sangat berat, setiap usaha tidak selalu berhasil dengan mulus. Usaha-usaha itu ada yang berhasil mengangkat sebagian dari keluarga yang menderita, tetapi ada juga yang sama sekali gagal. Sejak orde baru upaya itu telah menjadi bagian yang sangat penting dari upaya pembangunan. Pada periode orde reformasi hal serupa juga dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk pemberian santunan kompensasi BBM. Namun pengalaman membuktikan bahwa jumlah keluarga dan penduduk miskin tetap bertambah, bahkan keberhasilan mengurangi jumlah penduduk miskin seakan selalu berlomba dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang baru.

Biarpun berbagai program yang disebutkan diatas tidak seluruhnya berhasil karena berbagai alasan, ada beberapa hal yang menarik untuk kita simak bersama. Salah satu fenomena yang menonjol adalah bahwa penyediaan dana saja tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga pra sejahtera atau keluarga sejahtera I atau keluarga miskin yang ada, atau keluarga kurang mampu. Mereka banyak sekali mempunyai keterbatasan atau menghadapi masalah sosial kemasyarakatan yang biasanya tidak mendukung, yaitu faktor manusia yang kualitasnya rendah, faktor lingkungan yang tidak selalu bersahabat, dan kemampuan usaha yang sangat terbatas.

Karena faktor manusia dengan kemampuan usaha yang sangat terbatas itu, apabila mereka bisa menghasilkan suatu produk tertentu, umumnya produk yang dihasilkan itu mutunya sangat rendah dan tidak bisa menarik jumlah konsumen yang memadai. Akibatnya jumlah produk yang laku di jual di pasar tidak seimbang dengan ongkos produksi. Karena itu mereka sangat memerlukan tenaga yang mempunyai tingkat produktifitas dan kemampuan yang memadai serta mampu pula membaca kebutuhan pasar. Dalam keadaan belum ada sumber daya yang memenuhi persyaratan, maka dibutuhkan pendamping untuk mencapai tingkat produk yang layak jual.

Andaikan mereka mampu memproduksi sesuatu barang, terutama yang cara membuatnya mereka pelajari dari berbagai kursus yang banyak diselenggarakan oleh PKK atau organisasi lain semacam itu di masa lalu, umumnya juga sukar dijual. Alasannya sangat sederhana. Para peserta kursus biasanya mendapat "guru" yang orientasinya bukan pasar, tetapi keahliannya sendiri. Karena orientasinya adalah keahlian sendiri, atau keahlian gurunya, maka hasil produk itu tidak selalu menarik pasar, sehingga barang hasil produk itu tidak atau kurang laku jual. Kalau laku jual biasanya mempunyai nilai tambah yang sangat rendah.

Karena itu dibutuhkan tenaga ahli yang mampu memproduksi barang yang layak jual karena kualitasnya baik dan dibutuhkan. Para produsennya harus mempunyai keahlian yang luas. Disamping itu, untuk memelihara kontinuitas, keahlian itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, atau oleh beberapa orang dalam satu keluarga, tetapi oleh

banyak orang di desa atau daerah yang sama. Dibutuhkan suatu *critical mass* tertentu agar usaha kecil di suatu desa, di suatu kecamatan, atau di suatu kabupaten, dapat tetap melayani pasar dengan tingkat kelangsungan yang lestari serta bisa menyajikan suatu jenis produk dengan kualitas yang konsisten.

Usaha itu harus memberi kemungkinan bahwa suatu kelompok usaha kecil, atau suatu usaha di desa, mampu menghasilkan produk dengan kualitas lumayan atau baik, dan jumlahnya bisa banyak, continue, sehingga pasarnya tidak terbatas dan bisa diandalkan. Untuk itu perlu dikembangkan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan jumlahnya juga cukup. Pengertian inilah yang kemudian cocok dengan tekad pemerintah yang mulai tahun ini memperkenalkan sistem pendekatan pendidikan berbasis luas atau *Broad-Base Education (BBE) Approach*.

Pendekatan BBE ini mengharuskan upaya pendidikan diarahkan memberikan pembekalan yang memadai pada manusianya, pada upaya agar setiap siswa mengenal lingkungannya, mengetahui dengan mendalam kemampuan lingkungannya, kebutuhan lingkungannya, dan bagaimana masyarakat yang ada dalam lingkungan itu menghendaki kebutuhannya dapat dipenuhi. Menanggapi arahan pendekatan pendidikan tersebut, Yayasan Damandiri, yang selama enam tahun ini telah bekerja sama dengan pemerintah memberdayakan keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, atau keluarga kurang mampu, tetap ingin melanjutkan upaya yang sudah ada itu. Upaya lanjutan ini sekaligus merupakan upaya pemberdayaan remaja yang sudah dirintis sejak tahun 1999 yang lalu, yaitu upaya dukungan pemberdayaan untuk remaja anak-anak keluarga kurang mampu untuk makin tenang bersekolah pada pendidikan menengah dan bisa melanjutkan pada pendidikan tinggi, atau memberikan bekal kepada para remaja untuk bisa mandiri, ringkasnya memberikan bekal kepada remaja untuk belajar mandiri agar tidak mengulangi ketidak mampuan yang dialami orang tuanya.

Dilihat secara menyeluruh diketahui bahwa jumlah terbanyak remaja usia sekolah yang tidak sekolah adalah remaja usia SMU. Dari seluruh remaja usia SMU, yang tidak sekolah mencapai jumlah lebih dari 60 persen. Hampir pasti sebagian terbesar dari remaja itu adalah anak keluarga kurang mampu. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Yayasan Damandiri, melalui Yayasan Indra dan mitra kerjanya, dengan dukungan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Kepala BKKBN, pada tingkat awal adalah mengusahakan agar anak-anak keluarga kurang mampu yang sudah ada di sekolah, di SMU, SMK, atau Madrasah Aliyah, tetap bisa bertahan. Pada bagian lainnya, adalah mengusahakan agar anak-anak keluarga kurang mampu yang menonjol di sekolahnya dapat didukung dengan sikap masyarakat yang positif, perhatian, komitmen, dan tingkah laku yang memihak kepada mereka. Kita harapkan juga agar orang tuanya mempunyai komitmen dan kepercayaan untuk memberikan dorongan moril dan motivasi agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Mulai bulan Maret 2002, dengan kerjasama Menteri Pendidikan Nasional dan jajarannya, Yayasan Damandiri membantu SMU, SMK, dan MA meningkatkan mutu remaja siswa-siswa anak keluarga kurang mampu agar bisa berusaha mengembangkan

kemampuannya dengan makin rajin belajar. Kalau mereka menonjol dan bisa melebihi kemampuan diatas rata-rata teman-temannya se Kabupaten, kepada mereka diberikan dukungan Tabungan Damandiri dengan jumlah tabungan masing-masing Rp. 300.000,. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk biaya ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru atau untuk biaya kursus ketrampilan kalau tidak bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. (*Prof. Haryono Suyono, Pengamat Sosial Kemasyarakatan)-PengantarBM-432002*

# **MEMBANTU PARA IBU MEMBANGUN KOPERASI**

Program Pemberdayaan Keluarga dalam bidang ekonomi yang sejak tahun 1995 diselenggarakan oleh BKKBN dengan dukungan Yayasan Damandiri telah menghasilkan tidak kurang dari 600.000 kelompok kader usaha keluarga di seluruh Indonesia. Sebagian besar kader-kader itu masih sederhana dan perlu pembinaan lebih lanjut untuk bisa mandiri. Sebagian lainnya sudah agak maju dan dengan sentuhan sedikit saja bisa melanjutkan usahanya secara mandiri. Kelompok kedua ini memerlukan bantuan dan pendampingan untuk melanjutkan usaha dalam kelompoknya dan sebagian lagi bisa langsung membuka usaha sendiri secara mandiri.

Di Kabupaten Sragen, yang letaknya tidak jauh dari kota Solo, akhir-akhir ini mulai ada usaha sistematis yang mendapat dukungan dari Bupati untuk membantu para ibu dalam kelompok-kelompok itu mengembangkan usahanya secara mandiri. Bahkan beberapa waktu lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Sri Redjeki Sumarjoto, SH., berkunjung ke Sragen meresmikan gerakan pemberdayaan ekonomi kaum ibu itu. Peresmian itu merangsang kaum ibu yang semula telah bergerak dalam kelompok-kelompok kecil itu makin memperkuat tali kerjasamanya dalam bentuk ikatan koperasi yang berbadan hukum lebih kokoh. Dengan bentuk badan hukum koperasi itu mereka mengharapkan mendapat pembinaan sistematis dan lebih sungguh-sungguh dari berbagai lembaga pembangunan lainnya.

Masyarakat dan keluarga Kabupaten Sragen yang dekat kota Solo dan hidupnya kecukupan bisa saja berbelanja dengan mudah dan membeli keperluan sehari-harinya di pasar maupun di toko-toko yang menawarkan segala macam barang kebutuhan dengan harga yang cukup bersaing. Ada toko-toko yang eksklusif menawarkan segala macam barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat bersaing. Mereka bisa menikmati barang-barang yang ditawarkan dengan harga pabrik atau setidaknya mempunyai harga yang jauh lebih murah. Ada juga toko-toko yang memberikan penawaran istimewa dengan memberikan korting yang sangat tinggi seakan-akan barang-barang itu milik sendiri yang dijual sama dengan ongkos produksinya saja.

Namun masyarakat kurang mampu atau hidupnya pas-pasan tidak bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang lebih mampu itu. Mereka harus mengatur keadaan ekonomi rumah tangganya dengan sangat hati-hati dan kalau perlu terpaksa mengikuti selera yang disajikan oleh pelayanan warung-warung kecil yang ada di sekitar rumahnya. Bahkan tidak jarang mereka terkadang terpaksa harus membeli dengan sistem mencicil karena anggaran rumah tangganya tidak mencukupi. Jumlah keluarga dengan pola hidup seperti ini tidak sedikit.

Karena variasi yang demikian itu, Kabupaten Sragen bisa menjadi suatu ajang pengembangan kesempatan usaha berbagai kelompok masyarakat. Salah satu usaha bersama yang bisa dikembangkan adalah usaha keluarga dari ibu-ibu yang bergerak dalam bidang-bidang yang sangat sederhana sekedar untuk mengembangkan dukungan hidup keluarganya. Disamping itu Sragen juga menjanjikan kesempatan kepada para

pedagang untuk mengembangkan usaha di pedesaan sekitar tempat tinggalnya masing-masing melayani kebutuhan masyarakat yang ternyata masih melimpah.

### **Kegiatan Ibu Sederhana**

Yayasan Yekti Insan Sejahtera (YIS) yang selama ini bergerak membantu pemberdayaan kaum ibu di Solo, Sragen dan kabupaten sekitarnya, selama beberapa waktu belakangan ini sedang giat membantu para ibu di Sragen untuk mengembangkan koperasi swadaya masyarakat tersebut diatas dengan nama yang sama yaitu Koperasi Swadaya Masyarakat Yekti Insan Sejahtera atau KSM-YIS.

Pembentukan koperasi di Sragen tersebut adalah sebagai wadah pembelajaran sekaligus pemberdayaan dari para pengurus dan anggotanya secara terpadu. Gagasan pembentukan koperasi ini berawal dari pengalaman Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang selama ini bekerja sama dengan BKKBN memberdayakan para ibu-ibu yang awalnya adalah para peserta keluarga berencana. Para ibu-ibu itu kemudian diajak bergabung dalam kelompok-kelompok. Dalam kelompok itu mereka diberi pelatihan untuk usaha kecil-kecilan di lingkungan RT dan RW-nya. Setelah mendapatkan bimbingan kewirausahaan para ibu itu diberi kesempatan untuk praktek dalam usaha yang bernilai ekonomi produktif.

Dalam setiap usahanya para ibu didampingi para relawan dari Yayasan agar pada akhirnya dapat berdiri sendiri secara mandiri. Pendampingan itu dilakukan karena menurut pengalaman, kalau hanya dengan latihan dan diberikan modal, yang asalnya dari berbagai sumber, para ibu yang baru belajar itu belum bisa langsung berdiri dalam bidang usaha secara mandiri.

Dengan pendampingan yang sangat telaten, sebagian dari kelompok-kelompok ibu-ibu berkembang dengan baik dan bisa diantarkan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti BPR dan Bank lainnya dalam jumlah yang mencukupi untuk usaha yang lebih besar dan mempunyai kesempatan untuk makin mandiri. Ada juga yang kemudian memunculkan orang-orang tertentu yang sanggup untuk membuka usaha sendiri secara mandiri. Namun, biarpun segala usaha itu dilakukan dengan tanggung jawab renteng, dimana setiap anggota mempunyai kewajiban moril untuk tidak menyusahkan anggota lainnya, masih ada juga anggota yang nakal dan tidak dapat meneruskan usahanya karena dianggap mengganggu keutuhan gotong royong antar anggota lainnya. Anggota-anggota seperti itu, biarpun jumlahnya sangat sedikit, biasanya keluar dari kelompok, atau karena alasan-alasan kerikuhan solidaritas, terdesak keluar dari kelompoknya.

KSM-YIS yang sedang berkembang di Sragen mempunyai keanggotaan terdiri dari wakil-wakil kelompok yang semula berkembang dalam proses pelatihan sebelumnya. Kelompok-kelompok yang tadinya telah belajar dengan berbagai skim untuk usaha mandiri, dan berhasil, sedikit demi sedikit bergabung dalam koperasi yang baru tersebut. Ini berarti bahwa keanggotaan koperasi adalah keanggotaan yang awalnya dimulai

dengan kelompok yang mempunyai usaha sendiri dengan modal yang relatif kecil sekedar memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitarnya.

Dengan bergabung dalam koperasi para anggota yang mewakili kelompoknya itu berharap makin dapat memperoleh dan bertukar pengalaman dengan kelompok lainnya. Para anggota juga berharap bahwa kekuatan koperasi dapat menjadi pemersatu untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih besar dari Bank, seperti Bank BPR atau lembaga keuangan lainnya. Para anggota juga berharap dapat memperoleh jaringan pemasaran dari produk-produk mereka yang lebih luas sehingga kesejahteraan anggota dari kelompok-kelompok yang diwakilinya bertambah baik.

Koperasi ini semula hanya diikuti oleh anggota yang terbatas dari satu kecamatan. Pada saat ini telah berkembang dengan pesat dan diikuti oleh lebih dari 136 kelompok dengan lebih dari 2312 anggota dari 12 kecamatan. Koperasi ini terus menggulirkan program dan keanggotaannya dengan hati-hati karena ingin menjadi model yang dapat dikembangkan dengan program yang makin berbobot dan keanggotaan yang penuh kesadaran dan kebersamaan. Dalam proses pengembangannya koperasi ini menanamkan pengertian dan tata laksana ekonomi yang sehat, baik ekonomi anggota maupun ekonomi masyarakat sekitarnya. Tidak kalah pentingnya mereka juga menanamkan tanggung jawab bersama antar anggota untuk menjamin kehidupan yang lebih langgeng dari koperasi yang mereka bangun bersama itu.

Karena itu dalam setiap usahanya dalam bidang ekonomi, seperti pengalaman mereka sebelumnya, mereka mengetrapkan keharusan bagi setiap anggota yang ikut serta untuk mengikuti latihan usaha sebelum mereka mendapatkan kredit yang diusahakan melalui koperasi tersebut. Disamping itu, apabila dipandang perlu ada anggota atau kelompok lain yang lebih berpengalaman untuk membantu mendampingi usaha yang mereka kembangkan. Dengan cara demikian koperasi itu bertindak sebagai fasilitator dan sekaligus juga pendamping untuk kelompok anggotanya.

Model pengembangan usaha seperti itu sekaligus memberi kesempatan kepada setiap kelompok anggotanya untuk belajar mandiri dalam pengelolaan modal, produksi dan pemasaran dari produksi yang dihasilkannya. Keberhasilan dari usaha-usaha itu akan meningkatkan rasa percaya diri dari setiap kelompoknya untuk maju dan memberi dorongan kepada setiap anggota kelompoknya untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dengan cara bekerja keras dan hidup gotong royong dengan para anggota lainnya.

### ***Produk Unggulan yang Berkembang***

Sebagai suatu koperasi yang belum berumur satu tahun, produk unggulan koperasi ini masih sangat terbatas. Tetapi dengan mengumpulkan modal dari anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, koperasi ini bercita-cita dan mulai menyalurkan kredit untuk anggotanya. Dengan cara “menjual saham” kemampuan koperasi ini bertambah tinggi dan mampu memberikan kredit lebih besar kepada kelompok anggotanya. Selebihnya dari itu setiap kelompok kemudian bisa memberikan pinjaman kepada anggota kelompoknya dalam jumlah yang lebih besar.

Koperasi juga mulai menjalin kerjasama dengan BPR dan Bank setempat untuk mendapatkan kepercayaan menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan bimbingan dan penyaluran kredit dengan sistem bagi hasil dan keuntungan bersama. Koperasi mendapatkan semacam flafond untuk kredit yang bisa diteruskan dan kemudian setiap kelompok ikut menanda tangani akad kredit dengan Bank yang menyalurkan kredit untuk kelompok yang dianggap memenuhi syarat. Dengan pengalaman itu koperasi mengembangkan tiga usaha pokok sebagai berikut, pertama, pelayanan tabungan yang dibedakan atas dua jenis tabungan yaitu tabungan untuk biaya pendidikan dan tabungan pemupukan modal biasa yang jangka waktunya diatur secara khusus. Usaha kedua adalah pemberian kredit kepada anggotanya berdasarkan kesepakatan yang diatur secara khusus dengan anggotanya. Salah satu syarat unik kredit koperasi ini adalah adanya ‘agunan tunjuk’ untuk keamanan pinjaman anggotanya. Agunan ini adalah jaminan dengan menunjuk harta dari pengambil kredit koperasi. Dan yang ketiga adalah produk-produk pelatihan yang harus diikuti oleh setiap anggota yang ingin mendapatkan kredit usaha.

Pelatihan-pelatihan yang ditawarkan adalah yang erat hubungannya dengan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok yang bergabung dalam koperasi. Pelatihan itu meliputi topik-topik pelatihan manajemen kelompok swadaya masyarakat yang ditujukan khusus untuk kelompok yang baru. Diberikan juga pengetahuan dasar tentang tata cara pengembangan kelompok dan administrasi sederhana tentang kegiatan kelompoknya.

Pelatihan dalam bidang usaha ekonomi produktif mencakup pelatihan tentang ekonomi rumah tangga yang dimaksudkan untuk menanamkan disiplin anggota dan kelompoknya dalam mengelola modal, berproduksi dan pemasaran yang disarankan untuk dikembangkan oleh anggota maupun oleh kelompoknya. Pelatihan usaha kelompok itu dilengkapi dengan pelatihan tentang usaha kecil yang memerinci lebih lanjut kebutuhan-kebutuhan lain dalam usaha kecil yang makin mandiri. Pelatihan ini dikaitkan pula dengan pelatihan tentang usaha untuk mengelola kredit mikro yang sangat diperlukan bagi setiap anggota atau kelompok apabila suatu ketika harus berurusan dengan Bank.

Keistimewaan lain dari koperasi ini adalah cita-citanya untuk ikut bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, misalnya dengan memberikan pinjaman dengan bunga sangat ringan untuk anggota yang mempunyai keperluan mengembangkan kesehatan reproduksi seperti ikut KB, memeriksakan kehamilan dan membiayai kelahiran anaknya. Bantuan juga diberikan berupa beasiswa untuk anak-anak anggota atau keluarga kelompok yang dianggap kurang mampu.

Dengan cara-cara pengembangan itu kiranya banyak kelompok yang selama tigapuluh tahun terakhir ini telah dibina dan dikembangkan oleh BKKBN atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya bisa dirangsang dan dibantu untuk dikembangkan menjadi lembaga bersama atau koperasi dengan usaha-usaha ekonomi produktif yang makin mandiri. Kalau kekuatan lembaga koperasi atau lembaga bersama ini bergerak dengan bimbingan yang tepat, rasanya kesejahteraan bersama akan segera terwujud. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*)-Sragen-Koperasi-26102002.

# KOPERASI MAHASISWA BERBASIS MASYARAKAT

---

Oleh : Haryono Suyono

---

Dalam era globalisasi yang dahsyat dewasa ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan itu tidak saja pada masyarakat perkotaan yang relatif mudah terjangkau, tetapi juga pada masyarakat pedesaan dengan ciri-ciri tradisionalnya yang ketat dan penghargaannya terhadap nilai-nilai budaya yang tinggi. Masyarakat pedesaan yang sederhana, hidup damai dan akrab dengan lingkungannya juga tergoda oleh hiruk pikuk dan iming-iming globalisasi.

Rektor *Universitas Brawijaya* yang dilantik kurang dari sebulan lalu, *Prof. Dr. Ir. H. Bambang Guritno*, menjawab tantangan global itu dengan sambutan yang hangat terhadap *Pertemuan Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia* yang dihadiri oleh *hampir 500 peserta* di kampusnya. Rektor sadar bahwa pelatihan dan pendidikan seharusnya merupakan kebutuhan pokok keluarga modern, tetapi komitmen terhadap masalah ini dan praktek-praktek pengetrapannya masih harus dipacu. Bersamaan dengan perkembangan modernisasi tidak saja harus diikuti dengan pertumbuhan pusat-pusat pendidikan tetapi harus dipacu juga usaha perbaikan mutu serta kepedulian yang sungguh-sungguh kepada masyarakat sekelilingnya.

Pertumbuhan pusat pendidikan yang bermula di perkotaan atau di wilayah permukiman, hampir pasti karena tanah sempit dan mahal, akan meluas dan pindah ke daerah pedesaan atau daerah yang semula pedesaan. Ada yang dengan sopan mempergunakan tanah-tanah atau ladang kosong, yang dianggap kurang ekonomis, atau mengkonversi sawah kurang produktif menjadi pusat-pusat pendidikan. Ada pula yang didirikan di tengah-tengah permukiman penduduk yang lahannya murah.

Pada umumnya masyarakat desa yang sederhana menyambut “kedatangan modernisasi” itu dengan gembira. Dengan ikhlas mereka memberikan sumbangan terhadap upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang dianggap penting. Dalam gegap gempita kemajuan itu sebagian anggota masyarakat desa akan “diam” dan menjadi penonton yang baik. Sebagian lagi ikut berpartisipasi merombak rumah kediamannya menjadi tempat pondokan atau fasilitas untuk para mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air.

Disamping itu, masyarakat desa mencoba mempertahankan nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyangnya secara sederhana. Kemajuan di banyak perguruan tinggi di daerah pedesaan itu mengundang pula kesempatan wirausaha. Namun pada umumnya masyarakat desa yang pasif tidak melihat, atau karena kelemahannya “lengah” akan adanya kesempatan emas yang terbuka lebar itu.

Koperasi dalam lingkungan perguruan tinggi, baik oleh karyawan atau oleh para mahasiswa segera didirikan dan melengkapi lembaganya dengan warung atau

toko yang diramalkan mendapat sambutan gegap gempita karena memenuhi selera masyarakatnya. Mereka lupa bahwa pembeli adalah raja yang berbeda-beda selernya, sehingga usaha menyamakan selera tidak menarik dan gerakan koperasi kampus hanya berkembang secara pelahan. Salah satu alasannya adalah karena koperasi koperasi karyawan hanya diurus oleh pegawai dengan birokrasi yang kaku. Koperasi mahasiswa mengelola kegiatan dengan cara sambilan yang tidak menarik.

Melihat kesempatan ini, dalam ekonomi terbuka biasanya masyarakat usaha segera melompat memanfaatkan peluang yang terbuka. Dengan iming-iming dana mereka babat habis permukiman atau tanah di sekitar kampus yang masih tersisa. Segera didirikan rumah makan dan pusat-pusat pertokoan untuk melayani siswa, mahasiswa dan civitas akademika yang berkembang pesat di daerah itu. Rumah dan tanah penduduk sekitar kampus mereka beli dengan harga murah dan penduduk asli tergusur keluar dari jalur yang semula mereka nikmati karena maju dan dekat pusat peradaban baru.

Untuk mengatasi kelemahan itu perlu dipikirkan langkah-langkah yang lebih strategis, baik menolong penduduk sekitar untuk tetap tidak terusir dari tanah tumpah darahnya atau dari warisan orang tuanya. Masyarakat sekitar kampus harus diajak bermitra untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi wirausahawan yang bonafid, belajar membuka usaha melayani para mahasiswa dan seluruh civitas akademika yang harus saling menerima sebagai keluarga baru yang akrab. Upaya ini sekaligus bisa menolong *sebanyak mungkin mahasiswa* untuk *belajar wirausaha* dengan tekun dalam berbagai bidang yang luas. Apabila usaha ini berhasil dikembangkan dengan tepat akan membantu pemberdayaan *penduduk desa yang sederhana menjadi manusia baru dengan kemampuan wirausaha atau pengembangan koperasi yang maju dan modern.*

Program ini sekaligus dapat merupakan awal dari *gerakan bangga suka desa* – suatu gerakan *pembangunan keluarga modern dalam suasana kota di desa*, yaitu *keluarga maju, modern, berbudi pekerti luhur, mempunyai kekuatan moral, religius dan dinamika kebersamaan gotong royong* yang sekaligus mempersatukan para mahasiswa dan civitas akademika kampus dengan masyarakat sekitarnya secara damai dalam kebersamaan yang sejahtera.

### ***Koperasi Berwawasan Masyarakat***

Melihat potensi yang masih tersembunyi itu, para mahasiswa dan civitas akademika kampus mempunyai kekuatan untuk membangun keluarga sejahtera secara mandiri dan sekaligus mengentaskan penduduk di daerah pedesaan di sekitar kampus dari lembah kemiskinan. Karena itu dipandang perlu mengembangkan *kerjasama* antara *Yayasan Damandiri* dengan berbagai *Perguruan Tinggi, khususnya dengan koperasi mahasiswa untuk bersama masyarakat membentuk kelompok wirausaha atau koperasi berbasis masyarakat.*

Sasaran dan tujuan kerjasama itu adalah *membantu masyarakat dan keluarga kurang mampu* yang tinggal di *sekitar kampus* untuk *memberdayakan dirinya* secara mandiri menjadi pelopor pembangunan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Keberhasilan upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh dari upaya pemberdayaan mandiri, yang dilaksanakan secara mulus karena dilakukan dengan pendekatan budaya lokal, dengan menghargai harga diri manusia setinggi-tingginya, dengan menempatkan setiap sasaran tidak saja sebagai obyek, tetapi dibantu dengan pemberdayaan yang tulus agar bisa menjadi subyek handal yang bisa melanjutkan proses pemberdayaan yang mandiri. Agar setiap penduduk berpartisipasi diusahakan suatu proses pemberdayaan secara bertahap dalam tatanan yang mudah agar dapat diikuti oleh sebanyak mungkin keluarga kurang mampu.

Gagasan kerjasama ini akan *membantu keluarga sekitar kampus dan para mahasiswa* mereposisi peranannya masing-masing dalam pemberdayaan masyarakat sekitarnya, yaitu dengan ikut sertanya SDM bermutu tinggi yang ada di kampus mengawal dan mendampingi masyarakat sekitar kampus untuk maju melangkah dengan penuh keyakinan. Pada tingkat awal para mahasiswa dapat bertindak sebagai tenaga pendamping, berpraktek sebagai kader pembangunan yang berkualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi secara seimbang. Karena berdampingan dengan masyarakat nyata secara langsung, para mahasiswa akan mempunyai pengalaman, kemampuan serta kesanggupan luas yang sangat berguna sebagai bekal pelaksana pembangunan dimanapun mereka berada.

Untuk maksud itu diambil langkah-langkah konkrit yang berkesinambungan antara *Kampus* dengan *Koperasi Mahasiswa* untuk dengan komitmen yang tinggi mengembangkan kerjasama dengan *Yayasan Damandiri* dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Para mahasiswa dan dosen mengembangkan aliansi dengan berbagai lembaga lain dan aktor-aktor yang mampu mengadakan sinergy dengan masyarakat desa yang akan dikembangkan bersama.

Untuk kegiatan ini Koperasi Mahasiswa harus mempunyai komitmen untuk mengembangkan *koperasinya berbasis masyarakat dengan keanggotaan terbuka*, baik anggota dari penduduk setempat atau anggota dari civitas akademika lainnya. Koperasi mahasiswa harus membuka diri dengan menggandeng anak-anak muda, khususnya anak-anak remaja dari desa setempat, yang karena alasan kemiskinan, tidak sempat meneruskan pendidikan pada sekolah menengah umum atau tidak mampu menjadi mahasiswa.

Kerjasama ini memungkinkan anak-anak muda setempat belajar ketrampilan kewirausahaan yang memungkinkan mereka mendukung gerakan pemberdayaan masyarakat berjangka panjang. Kerjasama ini memungkinkan pula dikembangkannya kegiatan koperasi dengan keanggotaan dan jangkauan yang luas. Apabila koperasi itu maju, di masa depan bisa mengembangkan cabang-cabang atau kegiatan di tempat lain yang mempunyai pasar luas. Kerjasama ini memungkinkan anak-anak muda di desa sekitar kampus lebih menyatu dengan para mahasiswa yang ada sehingga dapat

dipelihara suasana belajar yang lebih kondusif dengan dukungan suasana aman, damai, sejahtera yang penuh ketenangan.

Disamping itu, anak-anak muda sebagai mitra kerja dapat membaca selera para mahasiswa dan civitas akademika sebagai konsumen kegiatan koperasi dengan lebih baik dan mampu mencipta dan menjual produk sesuai dengan selera sasarannya. Dengan konteks yang sama anak-anak muda di desa itu bisa mengadakan kegiatan bersama untuk menarik pasar dari luar kampus, misalnya dengan kegiatan olah raga mingguan, pasar seni mingguan atau kegiatan lain yang bisa menarik minat dari generasi muda lain di luar kampus. Kegiatan yang laku jual akan meningkatkan partisipasi anak-anak remaja dalam kerja yang mempunyai nilai produktif.

Karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat desa harus dimulai dengan pengembangan sumber daya manusia yang diikuti dengan partisipasi lengkap dari seluruh masyarakat dan keluarga yang menjadi sasaran. Kegagalan pemberdayaan sdm dan kegagalan mengikutsertakan sebanyak mungkin keluarga kurang mampu menjadi sasaran akan berakhir fatal. Lebih dari itu, karena kita berhubungan dengan masyarakat dan keluarga kurang mampu, maka dinamika pengembangannya sangat tergantung kepada bagian yang paling lemah dari sasaran tersebut.

Karena itu seluruh keluarga yang ada di daerah tersebut harus diajak bergabung dalam kelompok-kelompok koperasi yang setiap anggotanya harus bisa menjadi penggerak anggota kelompok lain yang dianggap lemah. Pendekatan kelompok ini akan memberikan kekuatan yang maha dahsyat karena banyak pihak bisa ikut bermain sebagai pemimpin dan pelaksana yang dinamis.

Pada tingkat awal kelompok dan anggotanya harus bisa mengikuti latihan kewirausahaan dengan pelatih yang sanggup mengikuti pendekatan pasar dalam memberikan latihan kepada anggota-anggota kelompok lain yang ada. Selanjutnya setiap kelompok harus diberi kesempatan mengikuti proses dan berkembang dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera I, selanjutnya menjadi keluarga sejahtera II dan seterusnya.

Lembaga pedesaan atau mitra kerja kampus atau koperasi mahasiswa harus bisa membantu melalui latihan, magang, dan atau kegiatan yang mungkin bisa dipusatkan di lembaga-lembaga desa itu, atau kalau perlu dikirim ke kampus untuk meninjau pasar dan membaca kebutuhan pasar itu, yaitu kebutuhan para mahasiswa dan civitas akademika lainnya. Latihan dan atau magang itu harus menghasilkan jumlah keluarga yang mampu dan makin banyak jumlahnya untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dengan mutu produk yang tinggi bisa berkelanjutan.

Kita sungguh bersyukur bahwa Bapak Prof. Dr. Ir Bambang Guritno, Rektor Unibraw tidak saja menjadi tuan rumah yang baik, tetapi siap bekerjasama dengan Yayasan Damandiri untuk mengembangkan persahabatan dan pemberdayaan dengan masyarakat sekitar kampus, membangun bersama mewujudkan kehidupan kampus yang bersahabat dan bermutu akademis unggul. Semoga kerjasama itu bisa dilakukan

secara terpadu dengan seluruh kekuatan pembangunan yang ada dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha yang mulia itu. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*) – *KopMa-642002*.



## JARINGAN WARUNG SUDARA

Pada tanggal 5 Nopember 2001 telah diresmikan kerjasama antara Yayasan Indonesia Damai Sejahtera (Indra) dengan Zakka Group di Tangerang, Esok harinya, tanggal 6 Nopember 2001 dilakukan kerjasama serupa antara Yayasan Indra dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) di Sragen, Jawa Tengah. Selama lebih dua tahun tahun ini telah dijalin kerjasama antara Yayasan Damandiri dengan Yayasan JK (Jembatan Kesejahteraan) di Jakarta. Ketiga kerjasama itu adalah untuk membantu Jaringan Warung yang dikelola oleh para Ibu yang sebelumnya tergolong keluarga tertinggal.

Kegiatan ibu-ibu yang sedang berjuang memberdayakan dirinya ini menarik perhatian Ibu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP), Ibu Sri Redjeki Sumaryoto. Apabila tidak ada aral melintang, bersama dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen beliau akan menyaksikan peristiwa itu dan sekaligus meresmikan Jaringan Warung Sudara di Sragen, Jawa Tengah. Seperti halnya Warung JK di Jabotabek, jaringan warung tersebut adalah jaringan pedagang eceran produk kebutuhan sehari-hari yang dikelola oleh Ibu-ibu di desa, yang semula termasuk keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, atau keluarga yang bila tidak ditolong akan dengan mudah jatuh dibawah garis kemiskinan.

Dengan kemauan, kemampuan dan kesempatan yang dibuka pemerintah bersama beberapa lembaga dan organisasi masyarakat, selama beberapa tahun ini Ibu-ibu di desa telah tergabung dalam berbagai kelompok di desa. Ada ibu-ibu yang bergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Ssejahtera (UPPKS), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), atau kelompok lainnya. Dalam kelompok mereka belajar menabung, mengikuti berbagai latihan, dan pembinaan usaha, secara teratur dan berkesinambungan, sehingga makin mahir dan mampu mengelola usaha kecil atau membuka warung sederhana secara mandiri.

Dalam jaringan Warung Sudara para Ibu menjual barang-barang keperluan pokok sehari-hari. Pada umumnya para ibu-ibu telah belajar memasarkan kebutuhan pokok itu selama lima tahun terakhir. Mereka mengetahui kebutuhan masyarakatnya dan mereka tahu pula bahwa usaha ini saling menguntungkan. Mereka menjaga dan menjamin kelangsungan aliran produk dengan kualitas yang baik. Dalam latihan sebelumnya mereka dibina oleh BKKBN atau organisasi wanita setempat dan mendapat dukungan dana kredit Kukesra yang didukung oleh Yayasan Damandiri, Bank, BPR atau oleh organisasi wanita dan lembaga lainnya.

Disamping itu, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang dibina oleh BKKBN dan semula tidak mempunyai pengalaman bisnis, telah dilatih dan didampingi secara teratur oleh para petugas lapangan KB atau PLKB, dan atau Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang didirikan sejak tahun 1973-1974 lalu. Mereka juga telah ikut serta dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan lain di desanya. Mereka belajar mengelola keuangan usaha mikro tersebut karena ikutserta dalam kredit Kukesra.

Mereka menikmati pembinaan yang teratur karena para petugas lapangan memihak keluarga miskin, terutama para Ibu rumah tangga yang karena ikut KB telah mendapat kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Proses pembinaan yang tidak saja bersifat finansial ekonomis itu berhasil karena juga mempunyai bobot sosiologis yang kental dengan muatan agamis. Upaya pembinaan itu diarahkan pada upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga secara terpadu. Para keluarga yang telah menikmati kredit yang relatif kecil pada waktu itu dibimbing agar mampu mulai mandiri dengan binaan yang lebih profesional.

Kelompok-kelompok yang maju itu besok pagi siap untuk membuka jaringan Warung Sudara, yaitu sarana untuk mengembangkan sistem usaha damai sejahtera yang mandiri. Dalam kegiatan ini mereka akan terjun untuk mendapatkan pembinaan dari lembaga profesional dan dukungan kredit Sudara yang jumlah dananya relatif lebih besar. Mereka diharapkan bergabung dalam koperasi dan melanjutkan usahanya dalam bentuk unit warung berbagai keperluan sehari-hari yang dibutuhkan rakyat sekitar kampungnya dengan harga terjangkau. Para anggota jaringan ini diharapkan bisa bermitra dengan pengusaha menengah dan besar yang mampu memasok barang untuk keperluan sehari-hari itu.

Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, termasuk pengalaman Warung JK di Jabotabek, atau Warung Koppas di Jakarta, mereka tetap diharapkan menjalin kerjasama dengan anggota sekitarnya sehingga dapat melanjutkan kepercayaan dengan kredit dari Bank Bukopin atau Bank Pembangunan Daerah, yang didukung Yayasan Damandiri, dengan tanggung jawab renteng. Kalau sebelumnya mereka bisa memperoleh kredit dengan jumlah maksimum hanya Rp. 320.000,-, diharapkan dalam skim kredit Sudara ini keperluan mereka yang wajar dapat dipenuhi.

Keuntungan lain dari rancangan program ini adalah adanya saling kepercayaan dari semua pihak bahwa dengan kemauan, kesempatan dan kemampuan, diharapkan usaha kedua belah pihak dapat dilakukan dengan baik. Keuntungan lain adalah bahwa dukungan dan pembinaan oleh Bank Bukopin dan Bank BPD, menjadikan kegiatan ini relatif bebas dari birokrasi yang berbelit-belit. Karena itu, diharapkan pembukaan jaringan warung ini mampu menjadi contoh dan merangsang pembangunan ekonomi kerakyatan yang padat tenaga. Dengan pendekatan padat tenaga, penduduk miskin di sekitarnya dapat ikut bekerja dalam usaha jaringan usaha yang makin luas variasinya. Dengan bekerja dalam berbagai bidang kegiatan itu jumlah penduduk miskin yang menganggur akan cepat berkurang.

### **Membangun Warung**

Membangun dan memelihara warung tidak mudah. Diperlukan disiplin keras, siap membuka warung pada pagi buta, menutupnya pada larut senja, dan harus buka lagi sewaktu pintu rumah diketuk karena ada tetangga membutuhkan sesuatu yang sangat diperlukannya. Keperluan tetangga itu harus siap dilayani saat itu juga. Pedagang warung

adalah pelayan pejuang yang harus tahan banting, mempunyai semangat tidak pantang mundur, berjiwa sosial tetapi tetap berorientasi bisnis.

Pengalaman perorangan seorang pedagang warung biasanya bervariasi. Dalam kegiatan warung ada yang mempunyai warung yang sifatnya mobil, yaitu suatu warung yang berpindah-pindah dan biasanya terbentuk karena sering menjual dagangannya ke pasar. Warung-warung yang bersifat mobil itu selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kesempatan yang terbuka. Bagi yang berpengalaman positif dan beruntung adalah mereka yang mendapat perlindungan dari para petugas Satpam di pasar. Lebih-lebih lagi kalau Satpam itu mengenalnya dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga miskin yang harus dilindungi. Tetapi tidak jarang ada pewarung berpindah-pindah yang selalu dikejar-kejar dan diusir karena dianggap mengganggu lalu lintas, atau berjualan di muka "warung senior" yang takut kehilangan langganan.

Ada juga pengalaman Yayasan Damandiri selama tiga tahun terakhir ini bekerja sama dengan Bank Bukopin menolong Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) di Jakarta. Dengan disediakan dana sekitar Rp. 6 milyar ternyata warung-warung kecil yang maju di pasar-pasar itu mendapat manfaat dalam memperluas usahanya.

Pengalaman lain adalah Jaringan Warung JK di Jabotabek yang berhasil. Jaringan warung ini mendapat dukungan kredit berupa barang dagangan dengan harga bersaing, sehingga dapat menjual keperluan pokok sehari-hari di kampungnya dengan harga bersaing. Keuntungan dari penjual adalah tidak harus mencari barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi karena mendapat hantaran dari pusat JK. Para pembeli dengan sendirinya dapat memperoleh barang keperluannya dengan harga bersaing dan kualitas yang terjamin.

Menurut catatan ada ribuan Jaringan Warung Ibu Mandiri (Riung Iman) di daerah karesidenan Solo yang siap untuk dikembangkan. Peresmian hari Selasa besuk merupakan awal dari pengembangan Warung Sudara di Sragen dan daerah sekitarnya. Pengembangan ini akan dilakukan dan dikelola bersama oleh Yayasan Indonesia Damai Sejahtera (Indra) bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS), Pemerintah Daerah, Bank Bukopin, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan berbagai lembaga lain di Sragen. Menurut rencana dalam enam bulan ini akan dikembangkan suatu jaringan warung Sudara dengan jumlah 1000 warung. Atas dasar keberhasilan dari 1000 warung itu lebih lanjut akan dikembangkan sekitar 4000 sampai 5000 dalam waktu satu tahun.

Mereka yang mendapat kesempatan utama adalah warung-warung kecil di kampung-kampung yang semula adalah keluarga miskin atau yang memperkerjakan keluarga miskin di warungnya. Mereka melayani keluarga-keluarga di kampungnya, terutama keluarga miskin dengan kemudahan, harga bersaing karena pemilik warung tidak mengambil untung terlalu besar, bahkan kalau perlu mengantarkan keperluan langganan kerumahnya. Semoga kegiatan yang sangat mulia ini mendapat limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan)

# DIPERLUKAN LEMBAGA KEUANGAN KELURAHAN

Sejak tahun 2001 Pemda DKI Jakarta telah mengambil prakarsa jitu mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu di RT dan RW secara langsung. Program ini dianggap oleh banyak kalangan merupakan terobosan jitu yang secara langsung memanfaatkan institusi masyarakat di tingkat kelurahan-kelurahan, yaitu dengan secara langsung mengambil basis masyarakat Rukun Warga (RW) dan masyarakat Rukun Tetangga (RT).

Oleh banyak kalangan program itu juga dinilai sebagai sebuah langkah maju dan bijak yang diambil Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyikapi perubahan-perubahan otonomi. Secara khusus program ini menyikapi Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001, dengan membentuk suatu Dewan Kelurahan atau disingkat DK atau Dekel. Dekel ini ditugasi menampung program dan kegiatan yang ada pada tingkat kelurahan.

Pembentukan Dekel dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Pembentukan Dekel juga merupakan pertanda kepercayaan dari Pemda DKI Jakarta kepada masyarakat dengan menyerahkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dibiayai lewat APBD DKI Jakarta langsung kepada masyarakat di tingkat RT/RW tersebut. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk merumuskan program dan kegiatan sendiri pada tingkat RT/RW melalui berbagai proposal atau cara-cara lain yang diatur sendiri oleh masyarakat.

Hanya sayang pembentukan Dekel ini belum disertai dengan pemberdayaan atau pembentukan **Lembaga Keuangan Mikro** di tingkat kelurahan atau kecamatan, sehingga penyaluran dana belum dapat dilakukan dengan cara profesional dan aman. Keluhan ini antara lain diuraikan sendiri oleh Kepala Bappeda DKI Jakarta, dr. Ritola Tasmaya, MPH., bahwa masih banyak laporan dari berbagai kelurahan yang penyerapan dananya masih jauh dari yang diharapkan. Ada pula wakil Camat yang melaporkan bahwa sesungguhnya ada banyak dana di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan yang masih tersisa tetapi belum dapat dihimpun menjadi satu kekuatan yang ampuh untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kurang mampu di daerah yang bersangkutan karena tidak adanya lembaga keuangan mikro di tingkat kecamatan itu.

Dengan alasan-alasan itulah perlu segera dipikirkan dan dilaksanakan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro, baik dalam bentuk koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditugasi dan sanggup serta bisa melayani kebutuhan masyarakat di tingkat RT dan RW secara profesional menurut aturan-aturan perbankan yang memadai.

Pembentukan lembaga keuangan mikro itu bisa dimulai dengan menempatkan Dekel dan pemerintah kelurahan sebagai sponsor dengan modal yang berasal dari dana yang

diperoleh dari subsidi pemerintah DKI Jakarta. Dana ini bersama dengan dukungan lain dari Pemerintah Propinsi atau pemerintah kota dapat ditempatkan menjadi dana pendamping atau dana abadi sebagai kekuatan bank agar kekuatan lembaga keuangan mikro itu menjadi cukup memadai untuk melayani para nasabahnya dengan kelincihan yang maksimal.

Bentuk kedua adalah dengan mengusahakan dikembangkannya BPR pada tingkat kecamatan dan kelurahan yang ditugasi secara khusus untuk menjadi penyalur dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat itu dengan syarat-syarat yang makin lama makin maju. Lembaga BPR itu dengan mudah dapat menyalurkan dana dengan aman dan mengambil (*melakukan koleksi*) yang bersifat harian sambil melatih nasabah keluarga kurang mampu untuk makin biasa menghadapi sistem perbankan komersial biasa yang ada. Dengan makin biasa menghadapi sistem perbankan secara komersial ini, apabila nanti usahanya maju maka batas kreditnya akan sangat *fleksibel* karena dapat memanfaatkan dana pasar yang tersedia secara melimpah di setiap bank.

Pada tingkat awal pembentukan lembaga keuangan mikro itu pemerintah daerah di kota atau di propinsi dapat ikut serta secara aktif untuk beberapa tahun agar supaya sasaran keluarga kurang mampu yang menjadi arah penyaluran kredit dapat didekati dengan pasti dan dana yang disediakan untuk keluarga kurang mampu tidak diserap atau terserap oleh keluarga yang lebih mampu untuk keperluan lainnya. Bisa juga lembaga-lembaga keuangan mikro ini memainkan peran dengan menyalurkan dana kepada usaha yang sifatnya padat tenaga kerja dengan arahan dan syarat agar tenaga kerja untuk memperluas usaha itu berasal dari anggota keluarga kurang mampu itu.

Dengan cara demikian lembaga keuangan mikro diarahkan untuk memihak keluarga kurang mampu dan diwajibkan untuk memberikan syarat-syarat khusus untuk penyaluran dananya, yaitu pertama, langsung kepada keluarga kurang mampu yang mempunyai usaha mandiri atau kepada keluarga atau usaha lain yang akan mempekerjakan anggota keluarga kurang mampu. Dengan arahan tersebut maka lembaga keuangan mikro itu akan menjadi pelengkap yang baik sekali untuk para anggota Dekel dan pejabat eksekutif kelurahan dalam memberikan dukungan partisipasi untuk keluarga kurang mampu dan para anggotanya membebaskan dirinya dari belenggu keterpurukan. Dengan demikian setiap anggota dapat mengikuti partisipasi aktif masyarakat tanpa adanya kendala kekurangan modal karena tersedia pada lembaga yang akrab dengan kegiatan mereka pada tingkat RT dan RW.

Pembentukan lembaga keuangan mikro di tingkat Kecamatan dan Kelurahan itu hendaknya juga sudah bisa bersambung secara *'On-Line'* dengan tingkat pusatnya sehingga gerakan penyaluran dana dapat diikuti dengan mudah oleh kantor pusat Bank induknya atau dapat dipantau oleh para pengambil keputusan pada tingkat kota, pada tingkat propinsi atau oleh mereka yang dipercaya untuk mengikuti gerakan pemberdayaan itu dengan baik. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*)-(A1/B2/D1)

## MEMPERLUAS PEMBERDAYAAN DI NTT

Dalam suasana kemelut pemboman di Bali dan dengan semangat bersama untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia, minggu lalu, hampir bersamaan dengan kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan di NTT, Pimpinan Yayasan Damandiri telah diundang oleh Gubernur NTT untuk membantu melanjutkan pemberdayaan perempuan dan keluarga kurang mampu di seluruh NTT.

Upaya dukungan Yayasan Damandiri dalam pemberdayaan keluarga di seluruh propinsi NTT telah dimulai sejak tahun 1995 bekerja-sama dengan BKKBN dan Bank BNI. Program awalnya adalah anjuran kepada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I untuk belajar menabung. Selama enam tahun, dengan bantuan dana Yayasan Damandiri sekitar Rp. 733 juta sebagai tabungan awal, sebanyak 362.438 keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I telah belajar menabung dalam tabungan Takesra melalui Bank BNI. Tabungan mereka telah mencapai sekitar Rp. 3.895.971.894,- yang tersimpan rapi pada Bank BNI.

Keluarga-keluarga itu juga telah bekerja keras belajar membangun usaha ekonomi produktif dalam skala mikro. Mereka mendapat kesempatan mengambil kredit Kukesra secara bertahap sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkan usaha. Jumlah kredit yang telah dinikmati oleh 12.181 kelompok dengan anggota 263.884 keluarga pada bulan April 2002 lalu telah mencapai sekitar Rp. 10.523.000.000,-.

Dengan dukungan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi NTT, dalam pertemuan dengan jajaran pembangunan di Kupang minggu lalu, Yayasan Damandiri telah sepakat mendukung kelanjutan pemberdayaan yang telah berlangsung lebih dari lima tahun tersebut. Dukungan yang baru itu akan dimulai melalui program pembinaan yang bersifat terpadu. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, pemerintah daerah akan memberikan dukungan fasilitasi melalui berbagai dinas dan lembaga pembangunan yang ada di NTT. Yayasan Damandiri, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di NTT dan Bank Bukopin cabang Kupang, akan memberikan dukungan pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.

Program pemberdayaan yang pertama akan segera dimulai pada akhir bulan ini dengan memilih para siswa SMU dan SMK, negeri dan swasta, anak-anak keluarga kurang mampu. Untuk setiap kabupaten dan kota, yang jumlah seluruhnya ada sebanyak 15 di seluruh NTT, akan dipilih tiga orang anak-anak keluarga kurang mampu untuk mendapatkan dukungan Bea Belajar Mandiri (BBM). Setiap siswa, khususnya siswa putri yang menonjol, akan menerima bantuan berupa tabungan sebesar Rp. 300.000,-. Setelah lulus, tabungan tersebut dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, atau mengikuti kursus-kursus, atau untuk bekal bekerja secara mandiri bersama orang tuanya.

Apabila anak-anak itu beruntung mendapat kesempatan melanjutkan kuliah pada pendidikan tinggi negeri, biaya SPP- mereka akan ditanggung oleh Yayasan Damandiri sampai yang bersangkutan selesai dengan pendidikan universitas pilihannya itu. Dengan cara demikian anak-anak itu diharapkan akan memutus rantai kemiskinan yang diderita oleh orang tua dan seluruh keluarganya.

Senada dengan upaya pemberdayaan melalui anak-anaknya itu, dari sekitar 12.181 kelompok yang selama enam tahun ini telah belajar usaha ekonomi produktif dan maju, akan diberi kesempatan untuk melanjutkan usahanya. Bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah NTT, dalam acara minggu lalu juga telah ditanda tangani kerjasama untuk mendukung keluarga yang maju tersebut. Mereka bisa mendapatkan kesempatan pendampingan dan kredit melalui program Pemberdayaan Keluarga Mandiri atau PUNDI. Untuk itu, pada tingkat awal, Yayasan Damandiri menyediakan dana sebesar Rp. 5 milyar melalui Bank Pembangunan Daerah NTT.

Dengan tersedianya dana itu seluruh kesempatan yang ada di NTT bertambah besar karena dana untuk Kukesra yang sekarang telah berakhir, akan diteruskan pada tahun 2003 yang akan datang dalam bentuk program lanjutan yang sedang dirumuskan dengan BKKBN dan Bank BNI.

Disamping kelompok-kelompok yang semula dibina oleh BKKBN, dana PUNDI juga dapat digunakan oleh kelompok lain yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat mikro. Dengan adanya kesempatan itu diharapkan para ibu-ibu yang sementara ini mengalami kesukaran untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam rangka mengembangkan upaya-upaya ekonomi skala kecil akan mendapat kesempatan baru yang menjanjikan.

Untuk memberikan dukungan kepada para ‘usahawan kecil’ belajar usaha yang mandiri, dengan kerjasama Universitas Nusa Cendana akan disediakan 100 tenaga pendamping yang terdiri dari mahasiswa semester ke 7 keatas dari berbagai fakultas yang ada. Tenaga mahasiswa itu akan dikoordinasikan oleh para dosennya dalam kepemimpinan Rektor Universitas tersebut. Untuk kerjasama itu para mahasiswa akan mendapat latihan dan pengenalan usaha yang dianggap penting. Sebagai kompensasi, para mahasiswa akan mendapat dukungan pembayaran SPP-nya selama satu tahun penuh dari Yayasan Damandiri.

Disamping kelanjutan program yang ada, dikembangkan juga program-program baru untuk menolong para pedagang kecil yang ada di pasar-pasar. Para pedagang yang mampu mencicil suatu pinjaman sebesar Rp. 10.000,- setiap hari sedang dipertimbangkan untuk mendapat pinjaman modal tambahan agar dagangannya bertambah banyak dan dapat memperluas usahanya dengan mempekerjakan tenaga-tenaga baru yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, disamping kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah, untuk kota Kupang dikembangkan juga kerjasama dengan Bank Bukopin setempat. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*). – *Pengantar-NTT-28102002*.

## MERASAKAN NIKMAT KEMERDEKAAN

Setelah sekian lama menghirup kemerdekaan, masyarakat di 90 pulau dari sekitar 116 pulau yang ada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai merasakan denyut harapan baru dan nikmatnya kemerdekaan. Harapan itu mulai nampak karena dalam suasana otonomi daerah yang marak dewasa ini, Bupati Pangkep, Gaffar Patappe, dalam langkahnya yang sigap tidak menanggapi otonomi dengan retorika politik vokal, tetapi langsung mengambil langkah konkrit yang menyejukkan. Dalam tiga tahun terakhir ini harapan masa depan masyarakat pulau itu dari hari kehari diwujudkan dengan perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesempatan usaha yang justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Semula, dengan terbelalak Bupati merasa heran melihat kenapa ibu-ibu yang sedang mengandung, melahirkan dan menyusui di pulau tidak dilayani oleh para bidan dengan pelayanan yang memadai padahal fasilitas dianggap cukup. Padahal pedoman dari atasan sudah jelas, apabila seorang ibu sedang mengandung, dia harus dirawat oleh bidan dan dokter, minimal empat kali selama masa kandungan. Kalau melahirkan harus ditolong oleh bidan apabila fasilitas dokter atau rumah bersalin yang memadai memang tidak ada. Pedoman itu dibuat untuk mencegah dan menurunkan tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan yang memang masih sangat tinggi di Indonesia. Bagi masyarakat pulau-pulau di Kabupaten Pangkep, pedoman itu hanya baik diatas kertas. Selama bertahun-tahun, bahkan barangkali selama berabad-abad masyarakat pulau di Pangkep itu tidak pernah mengenal bidan atau perawatan yang disyaratkan itu.

Dengan memutar otak Bupati menugaskan stafnya untuk menyelidiki kenapa pelayanan dasar yang sangat sederhana itu tidak dapat dilakukan di pulau-pulau di Pangkep padahal telah cukup tersedia sarana yang disiapkan oleh pemerintah di kepulauan itu. Bahkan dilaporkan sarana itu ada sebagian yang justru terbengkelai karena tidak cukup tenaga yang sanggup melayani di daerah kepulauan yang sangat luas itu. Tenaga-tenaga yang terdidik banyak terkumpul di daratan dan jarang yang betah tinggal di kepulauan yang memang memerlukan keakraban tersendiri itu. Banyak alasan yang dikemukakan kenapa tidak cukup tenaga yang betah dan mau tinggal mengabdikan untuk ibu-ibu dan anak-anak yang tidak berdosa dan ingin tetap sehat di pulau-pulau itu.

Setelah dilakukan penyelidikan secara seksama diketahui bahwa anak-anak gadis dan para remaja dari pulau selalu kalah bersaing memperebutkan bangku sekolah bidan atau perawat yang ditawarkan di tingkat kabupaten atau di tingkat propinsi, sehingga jarang, atau boleh dikata tidak ada tenaga bidan atau perawat yang berasal dari pulau atau mau kembali ke pulau. Para bidan biasanya datang dari sekolah-sekolah yang ada di kota atau mereka yang berasal dari daerah perkotaan. Begitu selesai dengan pendidikan mereka harus menjalani tugas praktek di tempat yang ditentukan, termasuk di pulau. Tetapi dengan berbagai alasan mereka yang berasal dari kota akan segera mencari jalan untuk pindah kembali ke kota.

Melihat gelagat yang kurang menguntungkan itu, Bupati Gaffar Patappe memanfaatkan peluang otonomi daerah dengan jitu. Dipanggilnya gadis-gadis dan remaja pulau untuk disekolahkan dan mendapat pendidikan dasar perawatan dari instansi-instansi yang berwewenang. Dengan jalan itu puluhan tenaga baru yang segar dan berasal dari pulau atau sanggup kembali ke pulau setelah mengikuti pendidikan diambilnya sesuai dengan kebutuhan. Sebagian dari tenaga-tenaga itu sudah mulai kembali dan berbakti melayani masyarakatnya di pulau asalnya. Harapan baru untuk masyarakat pulau di hari kemerdekaan sekarang ini mulai muncul sehingga anak-anak yang kemudian dilahirkan di pulau akan menikmati pelayanan kebidanan sederhana seperti saudara-saudaranya yang lain di daratan. Kemerdekaan makin mempunyai makna untuk masyarakat pulau.

Bupati Gaffar tidak berhenti dengan membenahi bidang kesehatan dasar saja. Dengan dukungan DPRD-nya, seluruh staf Pemda dikerahkannya untuk mencari terobosan lain untuk menolong masyarakat pulau yang "belum merdeka" itu. Dugaan Bupati ternyata benar. Anak-anak usia sekolah dasar, 7-12 tahun dan anak-anak usia sekolah menengah, 13-18 tahun tidak bersekolah bukan karena tidak ada sekolah. Memang mereka bekerja keras membantu orang tuanya dengan pekerjaan apa adanya. Di pulau-pulau ada banyak gedung sekolah, ada sedikit fasilitas sekolah, tetapi langka guru dan fasilitas pendukungnya.

Seperti halnya bidan dan perawat rumah sakit, guru di pulau merupakan barang langka. Mereka umumnya merupakan tenaga terdidik yang untuk ikut dalam arus pendidikan itu harus memenuhi persyaratan tertentu dan bersaing secara ketat di tingkat kabupaten atau di tingkat propinsi. Anak-anak pulau yang bersekolah seadanya ke kota tidak mampu bersaing dengan mereka atau bahkan sekolahnya sekedar naik kelas dengan nilai pas-pasan saja. Untuk bersaing memperebutkan saingan memasuki pendidikan guru atau pendidikan menuju ke jenjang yang lebih tinggi biasanya anak-anak pulau kalah bersaing dengan teman-temannya yang berasal dari daratan. Akibatnya tidak ada yang mampu menjadi guru.

Pemda setempat mengambil langkah strategis bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat untuk secara khusus melatih tenaga guru yang "bahan baku"-nya berasal dari pulau. Pendidikan dua tahun pertama telah mulai menghasilkan lulusan dan kembali ke pulau asalnya. Harapan baru mulai muncul karena angkatan pertama ini segera bebenah dan menjadikan sekolah di pulau berfungsi secara wajar mengantar anak-anak yang selama ini tidak pernah mengenal bangku sampai tamat SD, atau mulai memasuki bangku SLTP di daerah pulau asalnya mulai mempunyai harapan baru.

Langkah-langkah konkrit ini dilanjutkan pula dengan membenahi keperluan usaha dibidang ekonomi yang menjanjikan. Produk dari pulau yang memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi mulai dibenahi pemasarannya dengan membangun pasar-pasar baru yang mudah di akses oleh para nelayan dari pulau. Para pedagang antar pulau mulai diberikan kesempatan menjadi tuan rumah dari perdagangan yang menguntungkan. Kemerdekaan yang kita peringati hari ini dengan gegap gempita perlu kita sertai dengan renungan yang jujur apakah langkah Pemda Pangkep itu sudah juga dikerjakan di daerah lain. Kalau belum, kiranya tidak usah malu-malu kita belajar dari daerah Pangkep dan

mengetrapkannya di daerah lainnya agar kemerdekaan betul-betul dirasakan di seluruh tanah air dengan sama nikmatnya. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*)-*Pengantar-Merdeka-1282002*